

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PENGAMBENGAN JEMBRANA BALI

*Social Economic Impacts of Pengembangan Nusantara Fishing Port (NFP)
Construction and Development*

Agus Suherman¹ dan Adhyaksa Dault²

¹Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Hayam wuruk 4A Semarang

²Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Imam Bardjo SH No 5 Semarang

Diserahkan : 17 September 2008; Diterima : 22 November 2008

ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan menampung kegiatan masyarakat perikanan, terutama terhadap aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, serta pembinaan masyarakat nelayan. Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi meliputi: penyediaan basis (*home base*) bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapal-kapal ikan seperti air tawar, bahan bakar minyak, es untuk perbekalan dan lain-lain. Sedangkan pelayanan terhadap nelayan sebagai unsur tenaga produksi meliputi: aspek pengolahan, aspek pemasaran dan aspek pembinaan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari pembangunan dan pengembangan PPN Pengembangan. Metode penelitian adalah metode survey deskriptif yang bersifat studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas PPN Pengembangan memberikan manfaat yang besar. PPN Pengembangan tidak mengharapkan keuntungan dari manfaat yang diterima. Hal ini dikarenakan tujuan dari PPN Pengembangan yaitu sebagai *support system* dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan mensejahterakan kehidupan para nelayan.

Kata kunci : PPN Pengembangan, Fasilitas, Sosial Ekonomi

ABSTRACT

Pengembangan Nusantara Fishing Port (NFP) provide fisheries society activities, especially production aspect, processing and marketing, and fishermen society guidance. The services provide for fishing boats as a production infrastructure consists of providing a home base for fishing vessels, ensures successful fish loading, logistic supply such as fresh water, fuel, ice for the fishing vessels. Whereas services provide for the fishermen consists of processing aspect, marketing and guidance. This research was done to analyse the social economic aspect of the construction and development of Pengembangan NFP. A study case descriptive survey method was applied. The results showed that the present of Pengembangan NFP facilities gave great beneficial. Pengembangan NFP does no profit oriented from the facilities that are provided since the objective of Pengembangan NFP is as a supporting system to improve the socioeconomic condition and the welfare of the fishermen

Key words: Pengembangan NFP, facilities, social economic

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta

optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan

ikan telah dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap, 2004).

Hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan di suatu daerah merupakan embrio pembangunan perekonomian di suatu daerah (Manurung 1995). Urgensi pelabuhan perikanan dalam kegiatan perikanan cukup jelas, yakni sebagai tempat berlabuh kapal atau perahu perikanan dan tempat melakukan kegiatan bongkar muat sarana produksi dan produksi. Fungsi pelabuhan perikanan sangat luas. Keberadaan pelabuhan perikanan dalam arti fisik, seperti kapasitas pelabuhan harus mampu mendorong kegiatan ekonomi lainnya sehingga pelabuhan perikanan menjadi kawasan pengembangan industri perikanan.

PPN Pengambangan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. PPN Pengambangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Pengambangan. PPN Pengambangan yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari pembangunan dan pengembangan PPN Pengambangan, ditinjau dari aspek sosial dan ekonomis bagi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey deskriptif yang bersifat studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian ideal yang diperlukan, jika penelitian yang dilakukan bersifat holistik dan mendalam. Dalam studi kasus, metode yang digunakan bersifat multi metode, karena dirancang untuk

menunjukkan suatu masalah secara terperinci dari sudut pandang peneliti dengan menggunakan berbagai sumber data (Blaxter *et al.* 2006). Yin (1996) menyatakan bahwa ada 6 sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus adalah: (1) dokumen; (2) rekaman arsip; (3) wawancara; (4) observasi langsung; observasi pemeran; dan (6) perangkat fisik. Dalam hal ini diperlukan dua kategori data yaitu data utama dan data penunjang. Data primer diperoleh dari pencatatan langsung di lapangan, wawancara pada beberapa nelayan dan pengamatan kejadian-kejadian khusus yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip tertulis serta laporan hasil penelitian serta publikasi. Adapun observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi, keadaan lingkungan kawasan, lokasi pemukiman dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta peran serta masyarakat pesisir yang berkegiatan dalam kawasan pengembangan PPN Pengambangan.

Untuk dapat melihat korelasi yang terjadi antara keberadaan PPN Pengambangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik yang berada di dalam pelabuhan (nelayan, bakul dan pengolah) maupun yang berada di luar pelabuhan (tukang ojek, pedagang keliling, warung dan sebagainya) maka dapat dilakukan melalui survey.

Data sekunder berupa kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat dilokasi dikumpulkan dari instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, PPN Pengambangan, serta instansi lain yang terkait dalam kajian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPN Pengambangan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. PPN Pengambangan terletak pada posisi 08^o 23' 46'' Lintang Selatan dan 114^o 34' 47'' Bujur Timur, terletak di desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Berjarak 9 km dari Kota Negara dan 105 km dari Kota Denpasar, menghadap ke Samudera Hindia dan Selat Bali.

PPN Pengambangan merupakan pusat kegiatan perikanan rakyat terbesar di Bali. Status tersebut di tunjang dengan adanya Industri

rakyat berupa pengasinan/pengeringan ikan sebanyak 10 unit yang berada di dalam kawasan Pelabuhan. Selain adanya industri rakyat terdapat pula industri pengalengan ikan dan tepung ikan yang jumlahnya mencapai 14 unit yang berada di luar kompleks pelabuhan. Pelabuhan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan asal Bali tetapi juga oleh nelayan asal Jawa Timur yang beroperasi di Selat Bali dan Samudera Indonesia.

PPN Pengambangan mulai dibangun pada tahun 1976/1977 secara bertahap dikembangkan dan dilengkapi berbagai prasarana dan fasilitas darat sampai dengan tahun 1996/1997 di bangun antara lain revetment, gedung TPI, bengkel, rumah genzet, tower air, WC Umum, Balai Pertemuan Nelayan, kantor, mess operator, gudang es, tempat penimbangan ikan, sarana peribadatan, paving block, jalan lingkungan, tempat parkir, drainase dan pagar keliling. Pengembangan PPN Pengambangan tersebut di dasarkan pada studi kelayakan yang di lakukan oleh *Fisheries Infrastructure Sector Project* dengan *Consultant Roger Consulting Marine Gmbh* pada tahun 1988.

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor: B/2712/M.PAN/12/2005. Tanggal 30 Desember 2005 dalam Selayang Pandang PPN Pengambangan (2007), hal Penataan organisasi unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, PPN Pengambangan ditetapkan menjadi eselon IVa yaitu PPN Pengambangan. Selanjutnya sejak tahun 2008 ditingkatkan statusnya menjadi PPN Pengambangan.

Dampak sosial dan ekonomi pembangunan dan pengembangan PPN Pengambangan, ada 4 kelompok masyarakat yang dijadikan obyek observasi. Kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat nelayan, bakul atau pemasar, pengolah/industri, dan kelompok pekerja lainnya.

a. Lapangan kerja yang langsung terkait dengan operasional PPN Pengambangan

Kegiatan yang ada di PPN Pengambangan antara lain adalah penangkapan ikan di laut, kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan yang tentunya memerlukan fasilitas pelabuhan diantaranya TPI dan pabrik es yang dalam operasionalisasinya juga menyerap tenaga kerja seperti, sopir angkutan barang, kuli dan lain-lain.

b. Lapangan kerja yang tidak langsung terkait dengan operasional PPN Pengambangan

Penambahan kegiatan di PPN Pengambangan berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru untuk melayani kebutuhan para pegawai/pekerja pelabuhan, misalnya pedagang makanan dan minuman serta tukang ojek. Tenaga kerja yang berada di PPN Pengambangan berasal dari Desa-deserta sekitarnya.

Kegiatan operasional pelabuhan perikanan juga tidak terlepas dari peranan unit-unit usaha yang ikut menyediakan kebutuhan nelayan. Unit-unit usaha yang berada di kawasan PPN Pengambangan. tersebut antara lain:

- Kios alat-alat perikanan yang menjual peralatan mesin, pancing, tali pancing, box ikan dan sebagainya.
- Unit perbekalan melaut yang menjual es balok, garam, jasa penggilingan es, strum accu dan lain-lain.
- Unit jasa seperti, MCK
- Warung-warung makan dan minuman.

Manfaat tidak langsung dari pengembangan PPN Pengambangan antara lain adalah :

- a. Penurunan biaya operasional kapal karena harga, antara lain bahan bakar, es dan air akan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya.
- b. Penambahan waktu penangkapan, sebagai akibat kemudahan yang diperoleh untuk mendapatkan keperluan operasional dan waktu bongkar yang menjadi relatif singkat.
- c. Peningkatan kualitas ikan.
- d. Peningkatan dan/atau kestabilan harga yang diterima nelayan.
- e. Peningkatan produksi ikan yang diharapkan sebagai akibat hal-hal tersebut di atas dan bertambahnya jumlah kapal penangkap.

Manfaat tidak langsung tersebut juga sesuai dengan penelitian Suherman (2007).

Berdasarkan perhitungan manfaat tidak langsung menunjukkan hasil yang cukup besar, hasil tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan suatu PP. Pengembangan suatu PP tidak harus menghitung untung rugi, namun harus juga memperhitungkan kebutuhan jangka panjang dan manfaat tidak langsung lainnya. Pendapat ini sesuai dengan Suherman (2007).

Tabel 1. Beberapa jenis manfaat tidak langsung PPN Pengembangan

No	Jenis Manfaat	Fasilitas PPN Pengembangan	
		Manfaat Aktual	
1.	Pemasaran hasil perikanan oleh nelayan dan sebagai sarana dalam mempertahankan mutu ikan	- peningkatan harga ikan (adanya pelelangan)	- pembeli (bakul ikan) banyak
		- lokasi dermaga bongkar dan TPI dekat (± 10 m)	- akses ke pasar ikan dan ke industri pengolahan dekat
		- produksi ikan segar meningkat	- penanganan ikan yang baik seperti cara pengangkutan dengan memperhatikan kualitas ikan yang akan dipasarkan
		- tersedianya sarana dan prasarana transportasi agar distribusi ikan secara cepat sampai ke konsumen	
2.	Memudahkan dalam memenuhi kebutuhan operasional nelayan	- ketersediaan kebutuhan operasional nelayan (es, solar, air tawar, serta perbekalan melaut lainnya)	- harga kebutuhan operasional terjangkau
		- dekat dengan kapal nelayan (adanya dermaga muat)	
3.	Adanya <i>multiplier effect</i> seperti peningkatan pendapatan pada sektor lain	- bertambahnya usaha di luar kawasan PPN Pengembangan (warung makan dan minuman), tingkat kebutuhan nelayan yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan	
4.	Adanya <i>economic of scale</i> seperti peningkatan skala usaha	- peningkatan usaha dari skala kecil menjadi besar	
5.	Adanya <i>dynamic secondary effect</i> seperti terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	- waktu kerja, motivasi kerja, kemampuan kerja	- jumlah nelayan,
		- pegawai pelabuhan (koperasi)	- pedagang eceran atau kaki lima
		- karyawan bengkel	- penjual makanan dan minuman
		- penjaga toko (waserda)	- karyawan perusahaan perikanan (pengumpulan dan pengolahan ikan)
		- karyawan pabrik	- bakul ikan

Sebagai suatu wilayah kerja yang cukup luas dan majemuk maka memerlukan tatanan agar dapat berfungsi secara optimal. Semua ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, apabila adanya kerjasama yang terkoordinir/terintegasi antara berbagai *stakeholder*, termasuk instansi, institusi dan masyarakat pengguna yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan masyarakat pesisir.

Profil Nelayan di PPN Pengembangan

Menurut data dari Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, di Kabupaten Jembrana sebanyak 9,462 jiwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. 46% dari jumlah tersebut merupakan nelayan PPN Pengembangan.

Dari hasil survey yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa nelayan yang beroperasi di PPN Pengembangan berumur rata-rata antara 19-50 tahun, pendidikan rata-rata SD (sekolah dasar), pendapatan rata-rata nelayan yang telah melakukan profesinya antara 5-15 tahun di PPN

Pengembangan berkisar antara Rp. 500.000- Rp. 1.000.000.

Ukuran kapal yang digunakan nelayan di PPN Pengembangan yaitu L (LOA) rata-rata 20-22,5 m, d (dalam) rata-rata 2-2,5 m, B (lebar) rata-rata 4-5,5 m. Bahan bakar yang digunakan untuk operasional adalah solar, alat penangkapan yang digunakan rata-rata jaring kolor dengan ukuran rata-rata alat tangkap Panjang antara 100-225 m, Lebar antara 65-76 m. Modal kerja nelayan Pengembangan umumnya menggunakan modal sendiri dalam melakukan operasionalnya, dalam 1 kali Trip jumlah ABK antara 15-55 orang.

Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan Pengembangan yang paling banyak adalah ikan lemuru, ikan layang dan ikan tongkol. Dengan ukuran rata-rata 10 cm. rata-rata hasil tangkapan dalam satu kali trip pada saat paceklik adalah antara 50 kg- 3 ton, dan pada saat musim puncak antara 25 ton-50 ton, 90 % dari hasil tangkapan adalah dalam kondisi segar dan sisanya 10 % dalam kondisi rusak.

Daerah penangkapan yang sering dilakukan yaitu disekitar laut Bali/tanah lot, proses penentuan daerah penangkapan umumnya berdasarkan pengalaman nelayan tersebut, teknik penangkapan umumnya menggunakan teknik pencahayaan. Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan Pengambengan umumnya di lelang di TPI, dengan harga rata-rata Rp. 2.000-Rp.8.000, dalam hal sistem bagi hasil umumnya nelayan Pengambengan menggunakan sistem 3;2;1 (3 bagian untuk Juragan; 2 bagian untuk nahkoda dan 1 bagian untuk ABK) namun ada bebearap nelayan yang menggunakan sistem 10;2;1 (10 bagian untuk Juragan; 2 bagian untuk Nahkoda; dan 1 bagian untuk nahkoda)dari sistem bagi hasil tersebut rata-rata penghasilan per trip yang diperoleh nelayan Pengambengan berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000.

Profil Bakul/Pemasar di PPN Pengambengan

Dari hasil survey yang telah dilakukan terhadap pekerja lain di wilayah PPN Pengambengan di peroleh hasil bahwa umumnya mereka bekerja sebagai bakul/pemasar >15 tahun, rata-rata pendidikan mereka adalah SD, SLTP dan SLTA, usia mereka rata-rata 28-70 tahun, pendapatan mereka rata-rata per bulan berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000.

Ikan yang mereka jual adalah ikan lemuru, dengan harga beli/kg antara Rp. 2.000 – Rp. 7.500, dan harga jual/kg antara Rp. 3.000 – Rp. 10.000, mereka memasarkan ikan umumnya ke plosok desa dengan menggunakan motor dan ada sebagian yang menggunakan sepeda.

Profil Pengolah/Industri di PPN Pengambengan

Dari hasil survey yang dilakukan diperoleh hasil bahwa industri pengolahan ikan yang terdapat di PPN pengambengan umumnya bergerak di bidang pengealengan ikan dan tepung ikan. Jenis ikan yang di olah meliputi ikan layang, ikan lemuru. Kapasitas produksi rata-rata 30 ton / hari. Suplay bahan baku rata-rata saat musim puncak 30 – 40 ton per hari, dengan ukuran rata-rata 10 – 15 cm, kondisi ikan yang dijasikan bahan baku adalah ikan segar. Proses mendapatkan bahan baku sangat mudah.

Wilayah pemasaran produk olahan Nasional (pulau jawa), ekspor. Harga beli ikan per kg antara Rp. 2.000- Rp. 6.000 dengan harga jual per kg tidak tentu.

Profil Pekerja Lain dalam Wilayah PPN Pengambengan

Dari hasil survey yang telah dilakukan terhadap pekerja lain di wilayah PPN

Pengambengan di peroleh hasil bahwa umumnya mereka membuka usaha warung baik makanan maupun keperluan nelayan lainnya, rata-rata pendidikan mereka adalah SD, SLTP dan SLTA, usia mereka rata-rata 23-72 tahun, pendapatan mereka rata-rata per bulan berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000. Usaha yang mereka lakukan rata-rata usaha skala kecil.

Persepsi para pekerja tersebut mengenai keberadaan PPN Pengambengan dari survey yang telah dilakukan adalah sebagian besar mereka merasa sangat nyaman dengan keberadaan PPN Pengambengan dan sebagian besar mereka sangat setuju jika PPN Pengambengan terus dikembangkan, dengan alasan jika PPN Pengambengan terus dikembangkan mereka dapat terus mengembangkan usahanya, ada tempat khusus bagi usaha mereka, ada perbaikan fasilitas, keamanan dan pencemaran lingkungan terus diperbaiki.

Keberadaan PPN Pengambengan sangat mendukung usaha yang telah mereka lakukan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pekerja di sekitar PPN Pengambengan adalah adanya pencemaran udara (bau limbah), lampu belum di perbaiki, keamanan masih kurang aman.

Unit Usaha, Tingkat Investasi dan Pasar

Investor dan pengusaha pengolahan pasca tangkap merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung perkembangan pelabuhan. Dengan adanya investor dan unit-unit usaha maka kegiatan pasca penangkapan dan pengolahan hasil ikan dapat diakomodasi dengan baik, sehingga tidak ada kesulitan bagi neayan untuk memasarkan hasil tangkapannya. Selain itu kebutuhan-kebutuhan yang menunjang dalam kegiatan penangkapan seperti perbekalan, suku cadang kapal, atau pun perlengkapan kegiatan penangkapan lainnya juga akan lebih mudah didapat oleh nelayan.

Selain perusahaan yang sudah berjalan, di PPN Pengambengan juga teradapat investor yang akan membangun usaha di kompleks pelabuhan (Tabel 2). Dengan adanya pelaku usaha baru diharapkan akan dapat lebih merangsang pertumbuhan PPN Pegambengan dan dapat merespon dengan baik rencana pengembangan PPN Pengambengan.

Pemasaran produksi dari nelayan adalah ke pabrik-pabrik pengalengan dan tepung ikan. Dengan keberadaan 14 perusahaan perikanan pengalengan ikan dan tepung ikan dilingkungan PPN Pengambengan maka peluang pasar untuk hasil produksi dari PPN Pengambengan sangatlah besar yaitu sekitar 626 ton per hari.

Tabel 2. Nama perusahaan berbadan hukum yang ada di lingkup PPN Pengambengan

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Produk (Ton)/Hari
1	PT. Intan Sakti	BBM	40
2	PT. Samudera Raya	Pengalengan Ikan	80
3	PT. Sumina Ekstrasindo	Pengalengan Ikan	-
4	PT. Indo Bali	Pengalengan Ikan	90
5	PT. Balimaya Permai	Pengalengan Ikan	120
6	PT. Pengambengan Raya	Pengalengan Ikan	-
7	PT. Indo Hamafish	Pengalengan Ikan	100
8	PT. Indo Citra	Pengalengan Ikan	75
9	CV. Jaya Baru	Tepung Ikan	40
10	CV. Bali Indah	Tepung Ikan	15
11	CV. Bali Indah	Pengalengan Ikan	30
12	UD. Hosana Buana Tunggal	Tepung Ikan	20
13	PT. Bumi Bali Mina	Tepung Ikan	-
14	PT. Dwipa Mina Nusantara	Tepung Ikan	15
15	PT. Wahana Baja Utama	Tepung Ikan	-

Sumber: PPN Pengambengan (2008)

Tabel 3. Nama investor yang akan membangun usaha di kompleks PPN Pengambengan

No.	Nama	Usaha	Luas Areal	Keterangan
1	Pemkab Jembrana	Dock / Slipway	-	Pembangunan
2	PT. Cilacap Samudera Fishing Industry	Cold Storage, Pengalengan Ikan, Docking	15.000 M2	Pembangunan
3	Erwan	Gudang Garam	200 M2	Pembangunan
4	Nanang S	Bengkel Las	200 M2	Pembangunan
5	Mashur	Bengkel Las	100 M2	Pembangunan
6	H. Suhadi	Bengkel dan Toko Suku Cadang	100 M2	Pembangunan
7	Abdurahman	Bengkel Las	100 M2	Pembangunan
8	Masirin	Toserba Nelayan	100 M2	Pembangunan
9	Musanah	Toko Suku Cadang	100 M2	Pembangunan
10	Khoiri	Gudang Es	100 M2	Pembangunan

Sumber : PPN Pengambengan, 2008

Selain perusahaan yang sudah berjalan, di PPN Pengambengan juga terdapat investor yang akan membangun usaha di kompleks pelabuhan. Dengan adanya pelaku usaha baru diharapkan akan dapat lebih merangsang pertumbuhan PPN Pengambengan dan dapat merespon dengan baik rencana pengembangan PPN Pengambengan (Tabel 3).

Implementasi fungsi pelabuhan perikanan yaitu telah dioperasionalkannya seluruh sumber daya yang ada. Keluaran dari operasional tersebut adalah berupa pelayanan terhadap pengguna. Berdasarkan hasil kajian bahwa identifikasi terhadap pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan sebagai wujud peranan keberadaan PPN Pengambengan relatif baik. Berdasarkan data sekunder dan observasi di lapangan terkait dengan fungsi PPN Pengambengan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Pusat Pengembangan masyarakat Nelayan

Fungsi pertama yaitu sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan tidak terlepas dari masyarakat pesisir, seperti pedagang ikan, pengolah dan pelaku ekonomi perikanan lainnya. Hal ini diarahkan agar dapat menunjang kegiatan masyarakat nelayan yang berbasis di Pelabuhan Perikanan tersebut.

Sulitnya akses ke sumber modal dan rendahnya ketrampilan dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi penangkapan yang lebih efisien serta kecilnya skala usaha pada sebagian nelayan tradisional, maka perlu diupayakan pengembangan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan penyuluhan. Mengingat Pelabuhan Perikanan merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan tempat yang paling sesuai dalam melaksanakan pengembangan masyarakat pesisir. Sehingga fasilitas yang mendukung

mengembangkan masyarakat pesisir yang telah ada seperti Balai Pertemuan Nelayan (BPN) agar dapat dioptimalkan fungsinya.

(2) Tempat Berlabuh kapal Perikanan

PPN Pengembangan dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat/merapat (*mooring*) kapal perikanan. Kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan. Pengembangan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas kolam labuh untuk kapal berukuran besar atau di atas 30 GT memberikan banyak kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan untuk berlabuh, baik dalam rangka mendaratkan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap serta tempat istirahat bagi nelayan sebelum berangkat lagi ke laut.

(3) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan

Selain dilengkapi kolam pelabuhan, PPN Pengembangan dilengkapi juga dengan fasilitas dermaga yang memberikan banyak kemudahan bagi kapal ikan untuk membongkar ikan hasil tangkapan. Dibandingkan sebelum ada pelabuhan perikanan, dengan adanya dermaga maka hasil tangkapan lebih terjamin mutunya. Selain itu peran pelabuhan sebagai tempat pendaratan ikan antara lain adalah (a) penyediaan tenaga dan sarana pendaratan ikan; (b) penyediaan alat angkut dan alat bongkar ikan hasil tangkapan; dan (c) memberikan pelayanan teknis untuk pendaratan ikan. Untuk itu diperlukan dermaga dan lantai dermaga sebagai kegiatan bongkar muat ikan yang didaratkan agar dapat lebih terjamin kualitasnya terhadap penurunan mutu ikan dan menjaga sanitasi lingkungan tempat pendaratan ikan.

(4) Tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan

Kapal/perahu perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan membutuhkan bahan perbekalan seperti BBM (solar, minyak tanah), es, air tawar, bahan makanan dan lain-lain. Dengan adanya berbagai fasilitas fungsional seperti penyaluran bahan perbekalan seperti instalansi BBM, instalansi air tawar dan ketersediaan pabrik es, maka kapal/perahu akan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam penyediaan bahan perbekalan untuk melaut. Selain fasilitas perbekalan, PPN Pengembangan juga dilengkapi dengan fasilitas perbengkelan dan perawatan kapal (*docking*) sehingga memperlancar kapal perikanan dalam melakukan perbaikan.

(5) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan

PPN Pengembangan kurang dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelelangan Ikan. Hal ini disebabkan karena penyelenggara pelelangan, yang telah ditunjuk belum melaksanakan pelelangan secara optimal. Aktivitas pelelangan ikan untuk menentukan kelayakan harga ikan baik bagi produsen/nelayan maupun bagi pedagang masih belum berjalan dengan baik, dimana hanya dilakukan penimbangan saja atau pencatatan karena transaksi penjualan telah dilakukan oleh pemilik dan pedagang yaitu sudah adanya ikatan antara nelayan dengan pedagang setempat atau dikenal dengan istilah "OPO". Sehingga apabila tidak segera diantisipasi dapat mengakibatkan monopoli perdagangan ikan secara sepihak yang berakibat rendahnya harga jual bagi produsen/nelayan dan berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan. Kendala yang dihadapi selama ini karena KUD tidak mampu mengambil alih penyedia modal/bakul. Keterkaitan nelayan dengan bakul disebabkan karena nelayan tidak mampu membeli perbekalan melaut secara kontan karena tingginya biaya operasional sehingga nelayan terikat pada pemilik modal. Peran PPN Pengembangan untuk mengatasi pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, perlu koordinasi bersama Muspika setempat dan instansi terkait agar kinerja dalam melaksanakan sistem lelang dan pengelolaan TPI dapat menjadi lebih baik yaitu dengan jalan mengambil alih fungsi bakul/pemilik modal bagi nelayan oleh KUD. Jika kondisi tersebut dapat dicapai nelayan pasti akan mendapatkan harga yang wajar berdasarkan hasil lelang.

(6) Pusat Pelaksanaan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Era globalisasi dan persaingan dalam pemasaran produk perikanan akan semakin ketat sehingga segala upaya perlu dilakukan untuk penguatan daya saing di pasar internasional. Persaingan ini lebih dipacu dengan bergaungnya isu-isu global seperti *food safety*, isu lingkungan hidup dan sebagainya. Bagi konsumen di dalam negeri juga terlihat adanya kecenderungan, tuntutan terhadap mutu yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu keanekaragaman produk perikanan siap saji atau siap masak merupakan trend permintaan masyarakat perkotaan. Jembrana sebagai daerah tujuan wisata bahari

jenis pemandangan alam, permintaan produk perikanan terutama ikan segar dengan mutu yang baik untuk restoran juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis, sehingga pada akhirnya akan mendukung perbaikan mutu produk perikanan yang didaratkan di PPN Pengambengan. Dimasa yang akan datang pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan serta tersedianya sarana pengolahan (*fish processing*) dan penyimpanan (*cold storage*) daalm kawasan pelabuhan perikanan sangat diperlukan karena menyangkut produk hasil perikanan yang akan dipasarkan.

Perbaikan sanitasi di areal kawasan pelabuhan perikanan belum optimal. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan air bersih sehingga perlu diupayakan penambahan sarana air bersih. Untuk keperluan pembersihan ikan di TPI bilamana sumber air tawar tidak mencukupi, diusakan menggunakan air laut yang cukup bersih. Juga masyarakat pengguna pelabuhan perikanan perlu ditumbuhkan sikap kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan sehingga tidak memberikan kesan kekumuhan di dalam areal pelabuhan.

Prioritas yang perlu ditingkatkan yaitu perkembangan prasarana pascapanen. Hal ini dimaksudkan agar produk perikanan punya daya saing dan dapat meningkatkan mutu hasil perikanan tersebut serta akan berdampak pada pendapatan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

(7) Pusat Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan

Sebagai tempat berlabuh dan pendaratan ikan, PPN Pengambengan merupakan tempat pertama pencatatan kegiatan operasional kapal-kapal penangkap ikan. Selain itu pelabuhan perikanan sebagai tempat berkumpulnya nelayan, pedagang ikan, dan pelaku ekonomi perikanan lainnya memungkinkan pelaksanaan berbagai penyuluhan dapat dilakukan secara efektif di PPN Pengambengan.

Sedangkan kegiatan pencatatan data perikanan pada pelabuhan perikanan ini sangat penting dalam pengendalian penangkapan ikan agar tidak melebihi jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTb). Diperlukan koordinasi antar berbagai pihak terutama semua unit usaha dalam lingkup kawasan pelabuhan perikanan, dalam memberikan data yang diperlukan serta koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan pencatatan data statistic perusahaan tangkap di

pelabuhan perikanan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Untuk mendukung berjalannya Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), pencatatan data statistic yang akurat dan ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami data-data di pelabuhan dapat menunjang operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Juga produksi ikan yang didaratkan dapat dimonitor sehingga tidak mengurangi volume produksi Indonesia. Sistem yang ada akan terkait langsung dengan pelelangan dan pencatatannya, dimana lelang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

(8) Pusat Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Ikan

Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pusat pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan karena apabila sumberdaya ikan tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, maka kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksi perikanan dalam jangka panjang akan terus menurun.

PPN Pengambengan sebagai basis pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan maka kegiatan pengawasan tersebut menyangkut pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan, hasil tangkapan ikan dan sebagainya. Fasilitas Pos pelayanan terpadu sebagai pangkalan (basis) keberangkatan para pengawas di laut dan patrol penangkapan ikan di laut perlu difungsikan perannya terutama menyangkut konflik pelanggaran yang terjadi di laut.

Beberapa kebijakan atau peran serta pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha penangkapan dan srategi kedepan bagi PPN Pengambengan.

- a. Peran serta pemerintah dalam memberikan pengetahuan teknologi untuk menunjang kegiatan penangkapan
- b. Rencana upaya pemindahan *fishing ground* nelayan Selat Bali ke Samudera Indonesia
- c. Upaya pemerintah menjadikan PPN Pengambengan menjadi sentra perikanan Provinsi Bali
- d. Implementasi *outring fishing port development* (ORFPoD).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Keberadaan PPN Pengambengan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

pantai, baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu terjadinya peningkatan usaha dan terbukanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar, dimana hal ini akan berpengaruh pada pendapatan. Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan PPN Pengembangan yaitu terjadinya persaingan usaha, konflik sosial dan ketersediaan sumberdaya ikan yang semakin berkurang.

2. Berdasarkan dari hasil analisis biaya dan manfaat, keberadaan fasilitas PPN Pengembangan memberikan manfaat yang besar. PPN Pengembangan tidak mengharapkan keuntungan dari manfaat yang diterima. Hal ini dikarenakan tujuan dari PPN Pengembangan yaitu sebagai *support system* dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan mensejahterakan kehidupan para nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, A. N, Suherman A. 2006. Tingkat pemanfaatan PPS Cilacap ditinjau dari pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang tersedia. *Buletin PSP* 15:1-12.
- Blaxter L, C Hughes dan M Thight. 2006. *How to research (Seluk-beluk melakukan riset)*. Edisi kedua. Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta. 425 hlm.
- Cholihq A; Rivai W dan Suwarna H. 1999. *Evaluasi Proyek (Suatu Pengantar)*. Bandung: Pionir Jaya. 138 hlm.
- Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. 2004. *Peranan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Perikanan*. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Manurung TV. 1995. Urgensi pelabuhan dalam pengembangan agribisnis perikanan rakyat (kasus Jawa Tengah). *Prosiding Agribisnis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. hlm 204-221.
- Suherman, A. 2007. *Rekayasa Model Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Disertasi).
- Yin RK. 1996. *Studi kasus: desain dan metode*. Edisi revisi. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.